



**MODUL PSIKOLOGI GENDER
(PSI131)**

**MODUL SESI 9
KESENJANGAN GENDER DALAM HUKUM, POLITIK, EKONOMI, &
PEMERINTAHAN**

DISUSUN OLEH

Deny Surya Saputra, S. Psi., M. Th., CCP

Universitas
Esa Unggul

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2020**

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :
Mampu memahami kesenjangan yang terjadi bagi perempuan dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan pemerintahan.

B. Uraian dan Contoh

KESENJANGAN HUKUM, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN

MDGs dan Kesehatan Perempuan

Permasalahan kesehatan dasar di Indonesia sebenarnya menggarisbawahi peran perempuan dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millenium Development Goals yang biasa disingkat menjadi MDGs. Kesehatan perempuan merupakan salah satu aspek utama yang perlu mendapat perhatian karena perempuan mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan status kesehatan dasar suatu negara. Organisasi kesehatan dunia WHO (World Health Organization) memasukkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (AKBA) dan angka kematian ibu (AKI) sebagai tiga indikator penting yang menentukan status kesehatan dasar suatu negara. Selain angka kematian, indikator kesehatan yang lain adalah status nutrisi balita dan akses ibu untuk mendapatkan pelayanan maternal yang adekuat.

Masalah kematian maternal di Indonesia masih sangat memprihatinkan, karena angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih yang tertinggi di Asia Tenggara. Meskipun sudah ada penurunan angka kematian maternal atau AKI dari 450 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990an menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada awal 2000 an, namun target MDGs akan sulit tercapai kalau dalam lima tahun ke depan tidak ada upaya yang lebih progresif dalam menurunkan AKI. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Menteri Kesehatan menargetkan bahwa Indonesia harus mampu mencapai AKI sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup. Sumber lain menyebutkan, target MDGs Indonesia adalah penurunan dua pertiga angka kematian dari tahun 1990, artinya angka kematian maternal pada tahun 2015 harus bisa ditekan menjadi sekitar 125 per 100.000 kelahiran hidup. Perlu diketahui di sini bahwa perhitungan AKI di Indonesia adalah hal yang sulit dilakukan secara akurat

sehingga angka yang pasti tidak bisa didapatkan, karena sumber yang berbeda memberikan data yang berbeda pula. Namun, secara umum masalah kematian maternal di Indonesia sulit untuk dituntaskan dan target penurunan AKI pada tahun 2015 sulit dicapai.

Masalah ini telah berulang kali disampaikan oleh berbagai pakar sebagai “warning” tentang pencapaian MDGs nomor 5, dan agar pemerintah mempunyai upaya ekstra untuk memacu penurunan AKI. Berkait dengan angka kematian maternal ini, WHO juga melaporkan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan karena menurunnya AKI dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1990an menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada awal tahun 2000an. Perhatikanlah bagaimana terdapat perbedaan yang sangat jauh dari perhitungan statistik AKI versi pemerintah (Bappenas) dan versi WHO.

Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBA) biasanya dihitung berapa jumlah bayi usia 0-12 bulan dan balita yang meninggal pada setiap 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian ibu adalah angka kematian ibu menjelang, saat dan sesudah melahirkan pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Perbedaan angka pembagi ini disebabkan karena jumlah kematian ibu atau kematian maternal jauh lebih sedikit dibanding kematian bayi.

Menurut Badan Perencanaan, Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam laporannya pada tahun 2004, angka kematian bayi di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan dari 128 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1960 menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1992 dan akhirnya 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2003. Sementara itu, angka kematian balita juga telah mengalami penurunan dari 216 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1960, menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup pada periode 1998-2002.

Dua indikator di atas menunjukkan bahwa status kesehatan Indonesia telah mengalami perbaikan. Meskipun dua indikator ini ditambah dengan status nutrisi balita-merupakan masalah kesehatan anak, peran perempuan sebagai ibu sangat menentukan karena umumnya pengasuhan anak diserahkan kepada ibu.

Hal yang penting juga untuk dicatat, meskipun data menunjukkan penurunan angka kematian bayi, balita, dan ibu, namun perlu diketahui bahwa angka-angka nasional

tersebut belum tentu mencerminkan apa yang terjadi di daerah. Hal ini diakibatkan oleh disparitas kesehatan pada setiap daerah di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2005 AKB terburuk terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 66 per 1.000 kelahiran hidup, sementara yang terbaik terjadi di DKI Jakarta, yaitu 18 kematian per 1.000 kelahiran hidup (Bappenas, 2007).

Selain itu, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, status kesehatan Indonesia sebetulnya masih sangat mengesankan. Beberapa indikator kesehatan Indonesia di bawah Vietnam, negara yang baru tahun 1985 membangun diri dari kerusakan perang dengan Amerika Serikat. Angka kematian bayi misalnya, masih 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand (Bappenas, 2007).

Sebagaimana disebutkan, kematian bayi dan balita sangat berkait dengan peran ibu sebagai pengasuh utama anak. Menurut WHO, ada tiga penyebab utama kematian bayi, yaitu infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan komplikasi saat kelahiran. Ketiganya menyumbang tiga perempat kematian bayi. Sementara itu penyebab utama kematian balita, selain ISPA dan diare, adalah meningitis, malnutrisi (status nutrisi atau gizi buruk) dan malaria. Apabila ditinjau kembali, nampak bahwa sebetulnya penyebab utama kematian bayi dan balita bisa dicegah kalau ibu mempunyai pengetahuan yang benar tentang pengasuhan anak dan mempunyai akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Selain itu, sejumlah faktor sosial juga menentukan bagaimana ibu mengasuh anak-anaknya, antara lain status ekonomi, tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal.

Status ekonomi menjadi faktor penting sekali, karena kemiskinan sering menjadi hambatan ibu untuk memberikan makanan yang bergizi. Namun miskin atau tidak punya uang tidak selalu menjadi faktor utama rendahnya gizi balita. Ada sejumlah faktor budaya di lingkungan miskin yang menjadi penghambat, misalnya kebiasaan ayah merokok di sekitar anak-anaknya, membiarkan anak-anak untuk jajan makanan yang lewat di kampung-kampung, membuang sampah di sembarang tempat, mencuci tangan hanya setelah makan dan tidak sebelum makan, dan lain sebagainya.

Kesehatan Perempuan dan Anak=Kesehatan Negara Masalah kesehatan perempuan dan anak sebagaimana diuraikan di atas, menjadi indikator kesehatan sebuah negara. Bukan tanpa alasan bila Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

memasukkan masalah ini dalam target Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). MDGs menjadi paradigma global yang disepakati oleh 198 negara anggota PBB pada tahun 2000. MDGs terdiri dari delapan buah tujuan yang menentukan keberhasilan pembangunan negara, yang ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2015.

Kedelapan tujuan tersebut adalah: 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) menurunkan angka kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7) memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan 8) membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Dari delapan tujuan pembangunan milenium tersebut di atas, tampak sekali besarnya peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta besarnya upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan perempuan. Tujuan pertama yang terkait dengan penanggulangan kelaparan, misalnya, membutuhkan pemahaman ibu tentang pengasuhan anak yang benar agar balita memperoleh makanan yang bergizi. Tanpa pemahaman ini, maka sulit untuk mencapai target menurunkan persentase balita yang mengalami gizi buruk (severe underweight) dan gizi kurang (moderate underweight). Padahal pemerintah Indonesia telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 angka prevalensi gizi buruk adalah 3,3 persen dan gizi kurang adalah 18 persen. Ini artinya dari 100 anak Indonesia, 3 orang diantaranya mengalami gizi buruk dan 18 orang mengalami gizi kurang.

Pada tahun 2009 angka nasional prevalensi status gizi kurang balita (< -2 SD) telah mencapai 18,4 persen. Meskipun secara nasional nampak tidak jauh dari yang ditargetkan, terdapat variasi status gizi di tiap provinsi. Misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) angka prevalensinya telah turun sampai 10 persen, sementara di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih 33,6 persen. Selain itu, ada empat provinsi yang tidak pernah absen dari kategori 10 provinsi dengan gizi terburuk selama 2005-2009, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Gorontalo (lihat [www://gizi.net](http://www.gizi.net)).

Disamping itu, kemiskinan perlu ditanggulangi karena ibu tidak cukup hanya memahami asupan gizi yang diperlukan anak balitanya. Bila tidak didukung dengan ekonomi yang memadai maka sulit bagi ibu untuk menyediakan makanan bergizi

bagi anak balitanya. Oleh sebab itu, tujuan pertama pembangunan milenium mencakup masalah kemiskinan dan kelaparan.

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Dalam segala situasi dan masa, ibu yang hidup dalam kemiskinan selalu dituntut untuk mengerjakan peran ganda sebagai pengasuh keluarga dan pencari nafkah tambahan, misalnya menjadi tukang cuci, pembantu rumah tangga, membuka warung atau toko kelontong di rumah. Di wilayah agraris, perempuan ikut ke sawah karena pada masa-masa tertentu peran perempuan sangat dibutuhkan, yaitu masa tanam padi dan menuai. Selain itu, perempuan pedesaan juga dituntut untuk mampu mengelola lahan kering dengan jenis tanaman yang cocok. Dengan demikian tampak jelas bahwa perempuan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik secara ekonomi maupun kesehatan.

Tujuan ketiga pembangunan milenium secara jelas menyebutkan tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas menargetkan bahwa Indonesia telah mampu menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015. Selain akses pada pendidikan, diharapkan juga adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja, termasuk pekerja upahan, kemampuan daya beli, serta peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga-lembaga publik (eksekutif, yudikatif, dan legislatif).

Masalah kesetaraan gender yang terkait dengan akses pendidikan sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia. Permasalahan kesetaraan gender di Indonesia pada umumnya tidak lagi berhubungan dengan kesempatan mendapat pendidikan dasar dan lanjutan, namun lebih berhubungan dengan pemilihan pendidikan tinggi dan bidang studi. Dalam hal ini, perempuan cenderung memilih bidang-bidang yang sesuai dengan konstruksi sosialnya yang menuntut sikap merawat atau mengasuh (nurturance), misalnya keperawatan, kedokteran gigi, psikologi, dan desain interior. Masih sedikit perempuan yang masuk di bidang-bidang yang umumnya dikuasai laki-laki karena lebih bersifat maskulin, misalnya otomotif dan penerbangan. Bidangbidang lain cenderung mengalami pergeseran. Bidang kedokteran misalnya, pada waktu lampau dikuasai laki-laki, sekarang telah ditekuni perempuan dengan proporsi yang setara. Pada keluarga ekonomi menengah ke bawah, ada kecenderungan anak perempuan diarahkan

untuk mengambil pendidikan akademi yang membutuhkan waktu lebih pendek dibanding pendidikan di universitas.

Tujuan Pembangunan Milenium keempat dan kelima, yaitu menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu, telah dibahas secara singkat sebelumnya. Pemerintah telah memasukkan target penurunan angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu (AKI) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup dalam Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Target-target tersebut bahkan sudah dipaparkan oleh Menteri Kesehatan dalam pidatonya di Geneva pada tanggal 19 Mei 2010 yang bertema "The Challenges of Improving Women's Health" (Pidato Menteri Kesehatan 2010). Target yang sudah dicanangkan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya konkrit untuk mencegah kematian ibu menjelang, saat dan setelah melahirkan.

Sebetulnya pemerintah telah mengembangkan beberapa program untuk mengurangi kematian maternal, antara lain Safe Motherhood, Suami SIAGA (Siap Antar Jaga) dan Making Pregnancy Safer. Namun sejauh ini belum ada perubahan yang signifikan dari program-program tersebut sehingga perlu dicermati lebih jauh mengapa upaya pemerintah ini nampaknya kurang berhasil. Dalam pidato pembukaan pertemuan tingkat menteri Asia Pasifik Tentang Tinjauan Pencapaian Pembangunan Milenium (MDGs), Wakil Presiden Boediono mengakui bahwa Indonesia masih berupaya untuk menekan angka kematian ibu dalam pencapaian target MDGs ([http : www.antara.com](http://www.antara.com)). Target menurunkan AKI nampaknya merupakan tujuan pembangunan milenium yang paling sulit dicapai. Laporan tahunan pencapaian MDGs sebetulnya sudah memberi masukan-masukan tentang apa saja yang perlu diperhatikan. Artinya, yang diperlukan sekarang adalah komitmen untuk segera merespon dalam tindakan nyata oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk mencapai tujuan keempat dan kelima ini, pendekatan gender dalam semua program sangat diperlukan. Hal ini terkait dengan peran pengasuhan yang dilakukan ibu serta pemahaman ibu mengenai kesehatan reproduksi. Kedua hal ini sangat signifikan dalam meningkatkan upaya menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Disamping itu akses pada layanan kesehatan ibu dan anak merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Keterbatasan layanan kegawat-daruratan obstetrik di

Indonesia merupakan salah satu kendala dalam mencegah kematian maternal, karena umumnya kegawat-daruratan obstetrik hanya tersedia di rumah sakit yang sering sulit dijangkau oleh ibu di desa-desa.

GENDER DAN POLITIK

Tanggal 8 Maret adalah Hari Perempuan Internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk merayakan capaian perempuan di segala lini baik di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Perayaan Hari Perempuan Internasional ini juga kerap digunakan sebagai momen untuk mengajak berbagai pihak untuk mengangkat isu-isu ketimpangan gender serta membangun kondisi yang lebih terbuka bagi semua pihak apapun jenis kelaminnya.

Di Indonesia, ketimpangan gender masih menjadi polemik di antara berbagai kalangan. Marak dan dalamnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menyebabkan sberbagai lapisan masyarakat mulai [mendesak pemerintah](#) agar mengeluarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain kekerasan seksual, perempuan juga rentan terhadap kekerasan yang terkait dengan hak-hak hukum dan ekonominya, seperti yang dialami buruh migran perempuan (BMP). Menurut data [Penempatan dan Perlindungan TKI Indonesia 2016](#) yang dirilis BNP2TKI, sejak tahun 2011 hingga 2016, ada ratusan ribu buruh migran dikirim ke luar negeri setiap tahunnya yang mayoritas bekerja di sektor informal dimana setengahnya adalah perempuan.

Lembaga bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan/[LBH APIK](#) yang merupakan mitra kerja TIFA dalam pemenuhan hak buruh migran perempuan mencatat, hak ekonomi dan hukum BMP korban perdagangan manusia (*trafficking*) yang seringkali dijadikan budak seksual atau kerja paksa justru sering diabaikan. Sepanjang tahun 2014-2016 misalnya, terdapat 12 kasus *trafficking* yang didampingi oleh APIK NTT hanya diputus pidana penjara bagi pelaku, sedangkan kompensasi atau restitusi tidak didapatkan oleh korban^[1].

Masalah-masalah di atas tidak hanya terjadi di Indonesia. Secara global, potret ketimpangan gender yang ada pun cukup muram, meski terdapat beberapa kemajuan. Seperti tertuang dalam *World Economic Forum 2016 Global Gender Gap report*, bahwa berkaca pada [tempo kemajuan](#) yang kita capai hingga saat ini, dan dengan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, ketimpangan gender secara global baru akan bisa ditutup dalam 170 tahun kedepan! Laporan tersebut

menyatakan, dari pengukuran yang dilakukan terhadap 144 negara, kesenjangan yang paling kentara ada pada partisipasi ekonomi dan penguatan politik. Secara global hanya 59% kesenjangan yang berhasil dijembatani dan sekitar 23% dalam hal kesenjangan politik, yang menunjukkan tren kenaikan namun dalam tempo yang sangat lambat.

Indonesia sendiri berada di peringkat 88 dari total 144 negara yang diikutsertakan dalam pengukuran. Peringkat ini masih dibawah Filipina yang termasuk sepuluh besar negara dengan performa paling baik dalam hal menutup ketimpangan gender (ranking 7). Peringkat ini juga masih dibawah rekan sejawat di Asia Tenggara seperti Laos (43) dan Vietnam (65). Hal ini menunjukkan Indonesia masih tertinggal di banding negara lainnya dalam mengatasi ketimpangan gender. Dari daftar [50 orang terkaya di Indonesia](#), misalnya, hanya satu orang perempuan. Bandingkan dengan [Filipina](#) dan [Thailand](#) yang mencatat masing-masing empat orang perempuan.

Representasi politik dari perempuan di Indonesia juga masih tersendat, seperti terlihat dari jumlah perempuan yang berhasil duduk di kursi dewan perwakilan. Dalam periode 2014-2019, sebagai hasil pemilu legislatif di tahun 2014, jumlah [perempuan yang duduk sebagai anggota DPR kabinet 2014-2019](#) hanya 97 orang, atau 17,32 persen dari total jumlah anggota DPR. Hal ini menurun dari kabinet sebelumnya dimana ada 103 perempuan yang menjadi perwakilan di DPR.

Kondisi tadi mengindikasikan masih adanya halangan bagi perempuan untuk secara lebih jauh berkiprah dalam sektor ekonomi dan politik. [Riset ADB](#) menemukan bahwa partisipasi tenaga kerja perempuan muda Indonesia di area urban memang meningkat, terutama bagi tenaga kerja bergaji (*wage employment*). Sementara tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di area pedesaan cenderung menurun dikarenakan keputusan untuk meninggalkan kerja-kerja informal dan tak berbayar.

Dalam temuan ADB, perempuan di Indonesia lebih meminati kerja-kerja bergaji, yang umumnya didominasi oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan tinggal di area perkotaan. Para perempuan ini juga secara umum lebih berdaya—memiliki otoritas lebih dalam keputusan rumah tangga dan cenderung lebih bersuara dalam menghadapi kekerasan dari pasangan. Hal ini berlaku bahkan dalam spektrum demografi dan ekonomi yang bervariasi.

Meski demikian, dibanding lelaki, perempuan masih belum terepresentasikan dalam posisi-posisi kepemimpinan dan manajerial. Hal ini mengindikasikan adanya [diskriminasi](#) dalam pemilihan posisi pimpinan atau manajer yang lebih cenderung

kepada kaum lelaki ketimbang perempuan, terlepas dari produktivitas maupun kemampuan si individu.

Yayasan TIFA sendiri percaya bahwa kerja-kerja pemberdayaan dapat meningkatkan akses perempuan terutama dalam sektor ekonomi dan politik. Oleh karena itu, TIFA bersama dengan mitra bekerja untuk peningkatan akses ekonomi, politik dan juga akses bantuan hukum. Kerjasama dengan [Sekolah Politik Perempuan Maupe](#) (SPPM) di Maros, Sulawesi Selatan, misalnya, telah berhasil meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tekad perempuan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak politik mereka. *“Bukan hanya itu, mereka, terutama yang mengikuti pendidikan sebaya yang mengupas tema demokrasi, perspektif kesetaraan gender, pilkada, kini tak lagi ragu bicara hak saat perhelatan Musrenbangdesa hingga Kabupaten,”* ujar Kamaruddin Azis yang merupakan evaluator program SPPM^[2].

Kerja-kerja mitra yang didukung Yayasan TIFA dalam perluasan akses keadilan melalui sekolah paralegal juga menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang diberikan bukan hanya membuka akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan minoritas, tetapi juga perluasan akses politik dan ekonomi bagi perempuan. Seperti [kisah Aprilni](#) yang merupakan paralegal asuhan LBH Padang yang kini juga menjabat sebagai Kepala Jurong, sebuah posisi yang amat jarang diampu oleh perempuan dalam konteks masyarakat Padang, Pariaman,

Jadi, harapan untuk menutup ketimpangan gender di Indonesia sangat terbuka dengan terus menghalau tantangan yang ada lewat kerja-kerja yang berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan untuk mengubah pandangan mengenai pembagian kerja lelaki-perempuan, atau bahwa perempuan cenderung lebih lemah dan lebih rendah kemampuannya dibanding lelaki. Data BPS menunjukkan, [hampir setengah dari penduduk Indonesia](#) adalah perempuan. Dengan demikian, kelalaian dalam mengatasi ketimpangan gender yang ada berpotensi meningkatkan kerentanan kemiskinan kepada setengah dari penduduk di Indonesia, yang tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi negara secara keseluruhan.

Konstruksi Perempuan oleh Struktur Sosial (Sumber: Psikologi Perempuan Konteks Indonesia, Nani Nurrachman & Imelda Bachtiar)

B. Perempuan, Identitas Sosial dan Organisasi

Nani Nurrachman

Kognisi sosial adalah pengetahuan tentang dunia sosial manusia (*social world*) yang mencakup pula di dalamnya pengetahuan tentang jenis kelamin. Proses kognitif yang mengelompokkan manusia ke dalam kelompok sosial merupakan proses yang hampir tak bisa dielakkan. Baik pada perempuan-laki-laki, berkulit sawo matangkulit putih-kulit hitam, atau berkelas sosial ekonomi atas-menengahbawah. Proses kategorisasi ini merupakan komponen yang diperlukan untuk mempermudah manusia mempersepsi dunia lingkungannya yang bisa memunculkan stereotipi.

Tidak akan ada stereotipi tentang perempuan-laki-laki, kecuali sengaja dibuat suatu pembedaan antara keduanya. Pengelompokan ke dalam kategorisasi demikian memudahkan pengorganisasian proses pikiran. Sekalipun dapat pula mengakibatkan kesalahan pada cara mempersepsi dan memahami sesuatu. Dalam hal ini seseorang bisa cenderung untuk membesar-besarkan kesamaan dalam suatu kelompok atau perbedaan yang ada antar kelompok. Bagi seseorang yang masuk dalam kelompok tertentu, ia secara konsisten dapat merasa positif tentang kelompoknya tersebut. Ia menjadi kurang stereotipis dalam penilaian tentang diri sendiri daripada penilaian terhadap orang lain. Kesemuanya ini akan memengaruhi bagaimana seseorang menampilkan dirinya secara sosial.

Sosial dan Identitas Sosial
Pengertian sosial disini merupakan dasar dari identitas sosial seseorang_ Menurut Marilyn Brewer (1991) identitas sosial adalah:

"... emails a shif? towards the perception of self as an inler-changeable exemplar of some social category and awayfrom the perception of self as a unique person. " (1991 : 476)

Seseorang tidak lagi dilihat sebagai diri pribadi individu tetapi terkait kepada sebuah kategori sosial yang ada. Sedangkan pengertian individualitas dari diri pribadi adalah diri pribadi yang khas dengan karakteristik yang membedakan dirinya dari orang lain dalam suatu konteks sosial. Pengertian ini merupakan dasar dari identitas personal seseorang. Tetapi kesadaran diri pribadi berkembang justru karena individu berada

di tengah-tengah individu lain. Dengan demikian identitas diri pribadi mempunyai keterkaitan dengan keanggotaannya dalam kelompok atau ketika ia mengadopsi suatu peran sosial.

Sebagai contoh, identitas diri pribadi seorang perempuan mempunyai arti yang berbeda bila ia dipandang sebagai istri atau pimpinan suatu lembaga. Dengan demikian seseorang akan mempunyai lebih dari suatu identitas sosial. Tergantung dari berbagai peran dan keanggotannya dalam kelompok di dalam masyarakat.

Akibat dari berbagai pengisian peran dan keanggotaannya dalam kelompok, seseorang kemudian mengkonseptualisasi dirinya di sekitar status, karakteristik pribadi atau perpaduan antara keduanya. Dalam contoh di atas perempuan itu mungkin saja adalah seorang perempuan yang berumur, pandai, ramah dan merupakan isteri dari seorang lakilaki yang menjadi suaminya serta menduduki suatu jabatan dalam suatu lembaga:

"...self-concepts organized around master statuses (such as gender: age, race, social class) personal traits or some combination of the two. " (Garin & Markus, 1984: 153)

Dengan lain perkataan bagaimana keanggotaan dalam suatu kelompok berfungsi sebagai referensi dan jalur informasi yang melandasi proses kognisi yang mengarah kepada suatu "skemata-diri pribadi". Skemata ini adalah:

"...cognitive generalizations about the self in particular domains, lend organization to experience. " (Garin & Markus, 1989: 1953)

Melalui pengetahuan tentang diri sendiri dalam berbagai bidang tertentu, seseorang bisa mengorganisasi diri untuk masuk dalam pengalaman baru. Dari proses ini diri pribadi mengalami dan mengarahkan pengembangannya. Secara umum pengembangan diri mengandung dua pengertian:

1. Pengertian sosial, karena diri pribadi terbentuk melalui interaksi interpersonal dan internalisasi dari peran-peran sosial yang diduduki oleh seseorang dalam lingkungan masyarakatnya (Mead 1934, Tajfel 1984, Sherif dan Sherif 1951).

2. Pengertian individualitas, karena penghayatan dan penampilan diri pribadi seseorang adalah unik dan berkesinambungan melintas waktu (Mead 1934, Allport 1961, James 1934).

Karenanya proses pengembangan diri pribadi mempunyai arti adanya pengembangan dari diri pribadi yang melampaui batas eksklusif individu. Pengertian sosial dari diri pribadi adalah kategorisasi diri pribadi ke dalam unit-unit sosial yang

lebih inklusif yang disebut Brewer sebagai “... *depersonalize the self-concept, where 'I' becomes we*” (Brewer 1991 : 476).

Gurin dan Markus (1989) lebih jauh mengatakan bahwa diri pribadi dalam pengertian sosial adalah:

“... a set of responses of the organism and is comprised of many parts that are called identities, each representing one is participation in structural social relations ” (1989: 153)

Relasi sosial merupakan dasar dari identitas sosial seseorang. Dengan memiliki apa yang dikatakan tentang identitas sosial di atas, Brewer (1991) kemudian menunjuk bahwa:

“... the self concept is expandable and contractable across different levels of social identity with associated transformations in the definition of self and the basis for self-evaluation. ” (1991: 476)

Melalui identitas sosialnya, seseorang dapat mengembangkan konsep dirinya. Identitas sosial ini pulalah yang menjadi dasar bagi evaluasi diri. Menurut Tajfel (1982) masyarakat terdiri dari kelompok sosial yang berdiri dan saling berhubungan satu sama lain atas dasar status dan kekuasaan yang dimiliki. Ia percaya bahwa struktur pengelompokan yang demikian ini mempunyai implikasi yang penting bagi pembentukan identitas. Tajfel (1982) mengikuti Festinger (1978) dalam berpikir bahwa pembentukan identitas terletak pada proses perbandingan sosial. Di sini suatu kelompok dibandingkan dan dibedakan dari kelompok lainnya. Dimensi yang diperbandingkan dan dibedakan untuk menandai kelompok yang ada disebut kategori sosial. Pada dasarnya dimensi ini adalah stereotipis atau merupakan konstruk-konstruk yang dibentuk atas dasar konsensus karena secara jelas dan tegas menandai batas-batas keanggotaannya yang membedakannya dari kelompok lain yang ada.

Menurut Tajfel (1982), seperti dikutip di sini:

“Social identity will be understood as that part of the individuals ' self-concept which derives from their knowledge of their membership of a social group (or groups) together with the values and emotions significance attached to that membership. ” (1982: 2)

Kelompok Sosial dan Organisasi Perempuan

Betapapun kaya dan luasnya pandangan individu tentang diri dan hubungannya dengan lingkungan sosialnya, beberapa aspek dari pandangan tentang diri pribadinya berasal dari keanggotaannya ke dalam kelompok sosial tertentu. Berarti ada aspek yang sama yang dipakai untuk memandang dirinya dan orang lain yang merupakan anggota dari kelompok yang sama.

“Two or more individuals who share a common social identification of themselves or; which is nearly the same thing, perceive themselves to be members of the same social category.” (Turner 1982: 15)

Apa yang perlu ditekankan disini adalah tinjauan terhadap keanggotaan seseorang di dalam kelompok ditujukan kepada keadaan penghayatan subjektif dari kebersamaannya (*we-ness*) dan bukan kepada keadaan struktur formal kelompoknya. Artinya, bagaimana seseorang merasa dirinya diterima, dibutuhkan serta diakui oleh sesama anggota lain dari kelompok di mana ia menjadi anggota. Sebagai sesama anggota, individu-individu tersebut memiliki identifikasi sosial yang sama dan memandang diri mereka masuk dalam kategori sosial yang sama.

Menurut Turner (1982) penghayatan subjektif akan kebersamaan dalam suatu kelompok dapat ditinjau dari dua macam model. Pertama, model “Kohesi Sosial” (*Social Cohesion*) yang cenderung “mengukuhkan rasa memiliki bersama kelompok” (*group-belongingness*) dan mempunyai dasar afektif. Model ini melihat bahwa individu-individu dalam kelompok terikat satu sama lain karena kelekatan afeksional. Kedua, model “Identifikasi Sosial” (*Social Identification*) yang mengasumsikan bahwa keanggotaan ke dalam kelompok secara psikologis mempunyai dasar perseptual atau kognitif. Identifikasi sosial ini dapat merujuk kepada proses penempatan diri atau orang lain dalam sistem kategori sosial yang digunakan untuk mendefinisikan diri atau orang lain tersebut.

Kedua macam model ini sangat relevan untuk memahami kelompok perempuan. Model pertama yang mendasarkan diri pada kelekatan afeksional paralel dengan intimitas antar perempuan sebagai sesama. Model kedua yang mendasarkan diri pada proses kognitif selain merujuk kepada proses penempatan perempuan sebagai kelompok yang berbeda dengan kelompok laki-laki, juga dapat merujuk kepada bagaimana perempuan menempatkan diri di antara perempuan lain.

Studi yang memakai kerangka teori Tajfel tentang identitas sosial ini mengasumsikan perempuan sebagai suatu kelompok sosial yang homogen. Sedangkan Baker (1989) menyatakan bahwa:

“...social identity is thus derived from evaluations of self as a member of the social group “women ’as distinct from the social group “men ” (1989: 86)

Bagi Baker, perempuan tidak mempunyai identitas sosial yang positif dari keanggotaannya dalam kelompok atas dasar jenis kelamin. Studi Breakwell pada tahun 1979 yang dikutip oleh Skevington dan Baker (1989) mencoba untuk mencari penjelasan yang lebih tepat mengapa identitas sosial perempuan kurang dapat diukur lewat kelompoknya. Ia kemudian membedakan antara kriteria internal dan eksternal yang berlaku bagi keanggotaannya perempuan dalam kelompok.

Kriteria eksternal seringkali berupa norma-norma sosial yang dipersonifikasi dalam bentuk stereotipi dan memiliki objektivitas atas dasar konsensus, terlepas dari fakta. Kriteria internal terdiri dari pengetahuan dan keyakinan pribadi tentang keanggotaannya dalam kelompok dan persepsi tentang bagaimana semua ini terkait pada diri pribadi. Breakwell kemudian menganggap bahwa bagi perempuan kedua faset dari keanggotaannya dalam kelompok perempuan biasanya tidak sepadan (*compatible*) karena tidak adanya kriteria eksternal yang pasti dan disetujui bersama. *“Consequently whenever a women synchronizes the ‘women ’ that she is and sees herself to be with ‘women ’as a society says she should be, the focus is likely to change and the external criteria are amended. ” (Skevington and Baker 1989: 6)*

Inilah yang menurut Breakwell mengakibatkan identitas sosial perempuan kurang memuaskan dirinya. Ketika perempuan memadukan gambaran antara dirinya sebagai perempuan sebagaimana yang ia ingin gambarkan tentang dirinya, dengan gambaran perempuan sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat, ada kemungkinan fokusnya akan berubah dengan tambahan kriteria dari faktor eksternal masyarakatnya.

Pengaruh Kelompok terhadap Diri Pribadi Perempuan

Bila Breakwell melihat kelompok perempuan dalam kaitannya dengan kelompok laki-laki, maka studi Gurin & Townsend pada tahun 1986 melihat pengaruh kelompok terhadap diri pribadi. Dalam studinya yang juga dikutip oleh Skevington & Baker (1989) tentang kesadaran dan identifikasi kelompok perempuan, mereka menyimpulkan bahwa dalam suatu kelompok perempuan cenderung mengidentifikasi diri dengan perempuan anggota lain dalam hal karakteristik pribadinya. Bisa juga keanggotaannya dalam kelompok perempuan merupakan aspek sentral dari konsep dirinya, tanpa perlu melibatkan penilaian status rendah dari perempuan sebagai

kelompok sosial. Hanya apabila kelompok perempuan melihat diri mereka diperlakukan secara tidak adil, maka kesadaran kelompok dan ketidakpuasan kolektif akan berkembang dan menimbulkan kebutuhan untuk mengubah posisi serta status kelompok.

Studi pertama tentang identitas sosial perempuan yang diketahui dan dikutip oleh Skevington dan Baker (1989) dilakukan oleh Williams dan Giles. Williams dan Giles melihat perempuan sebagai kelompok jenis kelamin yang kurang diuntungkan. Identitas sosial kelompok perempuan ini dibandingkan dan diperoleh dari kelompok laki-laki. Karena kelompok laki-laki lebih dominan, lebih punya kuasa, maka identifikasi kelompok perempuan membawa berbagai karakteristik yang negatif dan status yang rendah. Oleh sebab itu perempuan perlu mengambil tindakan agar mereka memperoleh arti yang positif sebagai kelompok perempuan.

Ada dua strategi yang dianjurkan oleh Williams dan Giles, untuk mengambil tindakan tersebut. *Pertama*, bila perempuan berada dalam posisi dimana kebutuhannya dapat dipenuhi, maka kemungkinan besar ia memilih untuk meningkatkan status pribadinya secara individual. Misalnya dengan mendefinisikan dirinya secara fungsional dengan jabatan atau posisi suaminya. Dengan mengarahkan usahanya untuk memperbaiki status sosial suami, perempuan mungkin saja mengalami peningkatan gambaran dirinya. Sebaliknya, *kedua*, bila perempuan secara kolektif tidak dapat menerima status mereka sebagai kelompok perempuan, mereka mungkin akan mengambil tindakan untuk memantapkan suatu identitas sosial yang positif bagi kelompoknya tersebut. Gerakan *Women's Lib* di Amerika merupakan contoh dari strategi yang kedua ini.

Untuk Indonesia, gambaran organisasi perempuan yang adalah organisasi isteri, pada waktu yang lalu cenderung menyerupai strategi yang pertama. Namun ciri ini kini mulai berkurang. Meskipun demikian untuk organisasi perempuan secara umum, belum tampak secara jelas bentuk strategi yang kedua.

Studi Williams dan Giles ini dikritik oleh Skevington dan Baker. *Kritik pertama* adalah dalam melihat perempuan, Williams dan Giles membuat kesalahan dengan berpegangan pada asumsi bahwa konsep perempuan dipersepsi oleh semua perempuan dengan cara yang sama. Mereka menggunakan dimensi-dimensi yang biasanya negatif dan diakui sebagai konsensus, bila membandingkan dirinya dengan laki-laki. *Kritik kedua* yang dilontarkan adalah mengenai persepsi tentang hubungan antara identitas kelompok dengan ideologi dominasi laki-laki yang menentukan relasi

antara kelompok perempuan dan laki-laki. Williams dan Giles mengasumsikan bahwa hanya kelompok perempuan yang menolak status-quo peran kelamin yang ada, akan mengidentifikasikan diri secara kuat sebagai kelompok dan karenanya kemudian mengadopsi strategi untuk memperbaiki dan meningkatkan status kelompoknya.

Skevington dan Baker menolak asumsi ini. Dengan mengutip serta mendasarkan diri pada berbagai studi, argumentasi yang dikemukakan adalah identifikasi kelompok atas dasar jenis kelamin tidak perlu dan tidak harus tergantung dari kesadaran kelompok (*group consciousness*). Kesadaran kelompok adalah kesadaran tentang status dan kekuasaan kelompok (perempuan) dalam konteks antar kelompok. Skevington dan Baker mengutip studi tentang *womanhood* sebagai kategori sosial yang menunjukkan bahwa para perempuan tradisional seringkali mengidentifikasikan dirinya secara kuat dengan kelompoknya; dan melihat peran mereka dalam hubungannya dengan laki-laki sebagai sesuatu yang mereka sukai. Pada saat yang sama mereka menerima keadaan status quo peran jenis kelamin yang ada. Peran perempuan ini tidak memandang hubungannya dengan laki-laki sebagai suatu konflik antar kelompok tetapi sebagai hubungan kerjasama perempuan-lelaki sebagai mana layaknya hubungan sebagai isteri-suami dalam konteks keluarga.

Studi-studi ini dapat dipakai untuk memahami dinamika pembangkitan kesadaran kelompok (*consciousness raising group*) pada dasawarsa 1970-an yaitu kelompok yang mengembangkan kesadaran diri perempuan tentang statusnya dalam masyarakat.

Universitas Esa Unggul

Ibu sebagai Identitas Sosial

Gambaran tentang ibu sebagai identitas sosial akan disinggung sebagai bagian terakhir dari tulisan ini. Studi yang dilakukan oleh Baker (1989) pada tahun 1982-1983 bertitik-tolak dari pandangan bahwa bagi perempuan kerja menjadi ibu untuk pertama kalinya akan mencetuskan rasa hilangnya identitas personal. Artinya, ibu akan tampil sebagai suatu kelompok dengan status yang rendah dibandingkan dengan perempuan kerja dalam kelompok sesama perempuan, daripada bila ia dibandingkan dengan laki-laki.

Nilai positif dari identitas sosial sebagai ibu tidak ditentukan oleh statusnya sebagai ibu dibandingkan peranan lain yang dapat diisi oleh perempuan, tetapi sampai dalam

batas mana menjadi ibu itu merupakan pilihan yang sadar dan aktif dari perempuan yang bersangkutan. Selain itu, peranan positif ini dipengaruhi pula oleh pilihan ibu tersebut tentang perempuan lain yang juga menjadi ibu dan dengan siapa ia mengembangkan hubungan yang erat.

Perbedaan biopsikologis dan pengalaman hidup yang melekat pada perempuan dan laki-laki membawa konsekuensi pula pada cara masing-masing pihak mempersepsi dan menghayati dunia realitas serta melakukan aktivitas di dalamnya. Pengalaman pada tingkat individual dan kolektif menunjukkan bahwa dunia realitas mempunyai ciri pengalaman atas dasar jenis kelamin (*sex division*) sebagai akibat dari standar ganda dalam norma dan peraturan yang ada.

Perbedaan itu dapat dilihat dari apakah suatu aktivitas disebut sebagai "bekerja" atau dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan atas nama 'cinta dan pengabdian', apakah penting atau tidak untuk dihargai secara formal, dan perlu tidaknya diberi imbalan, tidaklah ditentukan hanya atas dasar bentuk dan isi aktivitas tersebut tetapi didasari pula dari jenis kelamin individu yang melakukannya.

Sampai dengan usia sebelas tahun, baik anak perempuan maupun laki-laki mengikuti pola yang sama dalam perkembangan identitas jenis kelaminnya. Sekalipun demikian, sejak usia enam tahun anak akan lebih mengenakan atribusi sosial yang disukai bagi jenis kelaminnya sendiri daripada jenis kelamin lawannya. Antara usia duabelas hingga limabelas tahun anak mulai mengarahkan perhatian yang lebih besar pada penampilan fisik dan seksualitasnya. Untuk remaja putri berkembang kelekatan karena berjenis kelamin yang sama (*sex-bonding*) dan juga karena pengalaman perkembangan seksual yang sama. Persahabatan karena sama-sama remaja putri ini biasanya terus berlanjut hingga akhir remaja. Pengelompokan atas dasar jenis kelamin ini boleh dikatakan tetap terlihat dalam bidang kehidupan, bidang pekerjaan dan kegiatankegiatan sosial lainnya.

Keadaan demikian dapat mengakibatkan pengalaman kolektif perempuan yang mengandung suatu realitas paradoks (*paradoxical reality*). Hal ini disebabkan karena perempuan (tidak seperti laki-laki) hidup dalam dua dunia, dunia interaksi interpersonal sesama perempuan dan dunia interaksi interpersonal lelaki-perempuan yang didominasi laki-laki. Dalam dunia laki-laki, perempuan ibarat orang asing karena mereka tidak menjadi bagian daripadanya, karena mereka adalah perempuan. Dalam dunia perempuan, dunianya sendiri yang tampak asing pula, karena tidak diberi legitimasi formal sebagai suatu arena yang independen, eksklusif dan spesifik

perempuan. Oleh karenanya tidak dipersepsikan atau dianggap secara serius. Perempuan terpaksa berhadapan dengan benturan yang terjadi antara kedua dunia tersebut. Ia teralienasi dari dunianya sendiri dan pengalaman paradoksikal dalam berinteraksi dengan laki-laki, baik secara interpersonal maupun institutional. Hanya dalam diskusi bersama dengan sesama perempuan dan bekerja sama dalam kelompok, perempuan dapat teryakinkan kembali kekuatan dan kompetensinya serta memadukannya guna mencari alternatif-alternatif untuk bertindak, melakukan refleksi dan menyelesaikan serta mengatasi berbagai masalah.

Menurut Bernard (1981) dunia interpersonal perempuan, merupakan pula suatu kesatuan yang terpisah (separate entity) yang lebih dari hanya sekedar suatu kelas atas kasta ataupun pelengkap tambahan terhadap dunia laki-laki. Karenanya perlu ada klarifikasi terhadap posisi perempuan yang paradoks ini baik secara tersendiri, terpisah maupun secara terintegrasi.

Sedangkan menurut As (1984), kelompok perempuan sebagai salah satu dari sekian banyak kelompok yang ada dalam masyarakat, merupakan pencerminan dari dunia aktivitas perempuan dengan ciri-cirinya yang berbeda dari kelompok laki-laki. Namun sebagai suatu kelompok di dalam tatanan struktur masyarakat, maka kelompok perempuan tidaklah luput dari penempatannya ke dalam struktur tersebut dan diatur atas dasar status yang dikenakan kepadanya. Dan karena strukturisasi masyarakat lebih didominasi oleh laki-laki dan telah berlangsung sejak lama, maka penempatan kelompok perempuan pun dapat terkena male bias. Dengan demikian dunia perempuan tenggelam atau tersembunyi di balik tirai dunia laki-laki. Akibatnya perempuan di dalam kelompok berhadapan dengan suatu paradoxical reality. Artinya, ke dalam ia menghayati dan berkacah antara sesama perempuan, dunianya sendiri. Tetapi keluar ia berkacah di dunia laki-laki, dunia yang berbeda dan bidang yang terasa asing bahkan menekan atau mengancam dirinya.

Peranan Solidaritas Perempuan

Kalimat yang menyiratkan bahwa interaksi antar sesama perempuan dapat berkembang menjadi peranan solidaritas bersama perempuan, mempunyai peran yang penting namun masih kurang banyak dipelajari. Menurut Raymond (1986) female bonding atau kelekatan persahabatan antar sesama perempuan dapat membantu
"... create the woman of woman's own inventiveness " (menciptakan perempuan atas dasar kreasi perempuan itu sendiri) (Raymond 1986 : 5).

la juga mengutip Simone de Beauvoir yang menyatakan:

"... if(woman) did not exist, men would have invented her: But she also exist apart their inventiveness. " (1986 : 5)

Kalimat kedua Beauvoir ini sangat kurang dikutip orang daripada yang pertama. Padahal, menurut Raymond kalimat kedua ini mempunyai arti hanya perempuan yang membentuk dirinya sendiri dapat menjadi perempuan yang sebenarnya (original), tidak dibentuk atau diciptakan oleh laki-laki dan menjadi seorang teman bagi sesama perempuan lainnya.

Dari berbagai studi yang ada tentang pengembangan diri pribadi perempuan selama rentang kehidupannya, peranan perempuan sebagai ibu, hubungan ibu dengan anak perempuan dan interaksi interpersonal antar sesama perempuan menggambarkan betapa kompleksnya hubungan antar sesama perempuan itu.

Peranan perempuan terutama sebagai isteri dan ibu menempatkan perempuan dalam sorotan masyarakat. Sorotan ini secara proporsional lebih besar daripada sorotan terhadap diri pribadinya sendiri, sesuai dengan kapasitas yang ada padanya. Pengaruh sorotan masyarakat (secara sadar maupun tidak) akan terbawa pada dinamika interaksi

interpersonal ibu dengan anak perempuannya. Ini mencakup bagaimana ibu dan anak perempuan sebagai sesama perempuan menghadapi mitos dan stereotipi masyarakat dan sejauh mana ibu dan anak perempuannya saling memandang dan mengakui satu sama lain sebagai individu. Pengalaman ini, oleh anak perempuan akan terbawa ke dalam interaksi interpersonal dalam lingkungan sosial masyarakat, baik dengan sesama perempuan maupun dengan laki-laki. Dan bilamana anak perempuan ini berangkat dewasa, kemudian menikah, maka siklus interaksi ibu dengan anak perempuan akan dijalannya. Kali ini anak perempuan telah menduduki status dan peran sebagai ibu.

Pemikiran yang bersifat reflektif tentang diri sendiri, timbul setelah perempuan kemudian menjadi isteri dan ibu. Ibunya kini akan dilihat dan dibandingkan dengan perempuan dewasa lain, baik yang seusia dengan ibu maupun dirinya. Ia dapat melihat ibunya kini melalui kaca mata perempuan dewasa. Ia dapat memandang ibunya dari status ibu yang kini disandangnya. Dalam hal ini perempuan bisa menyadari bahwa ia dapat bercermin pada ibunya atau tidak. Persepsi ini akan menentukan semakin dekat tidaknya hubungan ibu dengan anak perempuannya sebagai sesama perempuan dewasa, isteri dan ibu. Berbagai perasaan positif dan

negatif ini, serta dapat tidaknya peran ini tersalur dengan baik, akan menentukan persepsi diri dan kualitas interaksi interpersonalnya dengan sesama perempuan. Mc Bride, 1973 ; Washburn, 177; Rubin, 1979; Friday, 1977; Caplan, 1981).

Dari uraian ini tersimpul secara implisit bahwa perempuan bisa menemui kendala dalam mengembangkan identitas diri pribadi sebagai individu di antara sesama perempuan. Solidaritas sesama perempuan yang dibangun atas dasar female bonding terlihat lebih mengukuhkan identitas sosial perempuan sebagai suatu kelompok, tetapi tidak menjamin akan mempermudah pengembangan diri pribadinya sebagai pribadi (person). Kesimpulan ini terkesan berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Raymond tentang female bonding yang dapat mengukuhkan keperempuanan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Jika kembali kepada analisa Horney tentang masyarakat barat yang sangat individualistic dan kompetitif, maka kesimpulan di atas dapat dimengerti. Hanya perempuan yang mempunyai identitas diri pribadi yang kuat dan memiliki kemampuan mental yang lebih besar, dapat mengakomodasikan diri pada masyarakat yang demikian individualistik dan kompetitif, daripada perempuan lain pada umumnya. Sebaliknya, pandangan Raymond tersebut tidak bertitik tolak dari pengalaman perempuan yang sangat mandiri ini, yang sampai batas tertentu merasakan kesendiriannya (*loneliness*) di tengah-tengah interaksi sosialnya, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan itu sendiri.

Karena alasan itulah, dalam membicarakan dampak female bonding perlu dibedakan antara “solidaritas atas dasar sosialisasi” semata dengan “solidaritas atas dasar profesionalitas” dalam interaksi antar sesama perempuan sebagai kelompok. Solidaritas atas dasar sosialisasi adalah hubungan relasi pertemanan sebagai sesama perempuan Misalnya.. kelompok-kelompok perempuan yang sifatnya sosial informal, salah satu bentuknya adalah arisan. Sedangkan solidaritas atas dasar profesionalitas adalah hubungan kerja atas dasar kapasitas profesional perempuan guna mencapai suatu tujuan bersama. Misalnya, kelompok-kelompok perempuan yang meski tidak berbentuk organisasi formal tetapi kegiatannya didasarkan atas profesi perempuan yang bersangkutan, salah satu bentuknya adalah kaukus perempuan di DPR.

Dari uraian teoretik tentang perempuan sebagai kelompok ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kelompok perempuan dapat menjadi sarana mengatasi isolasi perempuan dari lingkungan sosial masyarakatnya. Sebagai suatu

kelompok, ia memberikan identitas sosial tertentu. Kedua, kelompok perempuan mempunyai ciri-ciri female bonding dan paradoxical reality. Ketiga, female-bonding dapat mempunyai peran memperkokoh solidaritas antar sesama perempuan tetapi sekaligus dapat menjadi kendala pengembangan diri pribadi perempuan secara penuh. Keempat, paradoxical reality, merupakan tantangan yang dihadapi kelompok perempuan dalam berperan serta di lingkungan sosial masyarakat yang didominasi perspektif laki-laki, tetapi dalam organisasi dengan perspektif yang terbentuk dan ditopang oleh female bonding. Kelima, dari berbagai aktivitas yang dapat dilakukan perempuan, maka aktivitas sebagai ibu adalah yang pokok bagi kebanyakan perempuan. Dalam hal ini ibu dan anak perempuan mempunyai identifikasi dan peran jenis kelamin yang sama. Sebagai anak perempuan, ia akan belajar tentang pengisian berbagai perannya sebagai perempuan dari ibunya, sebagaimana ibunya juga belajar dari ibunya sendiri.

Kelima butir kesimpulan ini menjadi dasar pembentukan asumsi kognisi perempuan yang berkembang sebagai hasil interaksi antar sesama perempuan sebagai suatu kelompok di dalam organisasi perempuan. Asumsi pertama adalah bahwa identitas sosial perempuan Indonesia sebagai kelompok pimpinan organisasi perempuan bertumpu pada konsep ibu yang mendapat penopangannya oleh female bonding. Sedangkan asumsi kedua adalah kelompok perempuan mampu mempunyai peran mengembangkan diri pribadi perempuan itu sendiri, bila dipotong oleh kesadaran diri pribadi sebagai subjek pelaku dalam acara berpikirnya tentang diri dan lingkungan sosial masyarakat.

Perkembangan Organisasi Perempuan di Indonesia

Dalam sejarah perkembangan timbulnya organisasi perempuan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pergerakan nasional. Bahder Djohan (1975) di depan Kongres Pemuda Indonesia kesatu pada tahun 1926 mengatakan bahwa perjuangan perempuan Indonesia tidak dapat atau sulit dipisahkan dari kehidupan politik nasional. Oleh karena itu dianjurkan olehnya agar perempuan Indonesia mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri tentang kedudukan apa yang harus dipegangnya dalam kebangkitan nasional dan bahwa pembangunan persatuan nasional harus menjadi pedomannya.

Pandangan lain adalah pandangan yang dapat ditarik dari pernyataan Soekarno (1963) dalam buku Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perdjangan Republik

Indonesia, bahwa soal perempuan belum pernah dipelajari sungguh-sungguh, dalam kaitannya dengan sejarah pergerakan Indonesia melalui kesadaran perempuan akan dirinya sendiri. Sebagai pembanding awal, Soekarno menggambarkan perubahan ke-hidupan perempuan yang terjadi sebagai akibat perubahan sosial masyarakat, yang kemudian menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan.

Soekarno mencermati sejarah perubahan sosial manusia yang terjadi di dunia dengan fokus pada peran dan gerakan perempuan yang terjadi. Perubahan kehidupan masyarakat peternakan ke masyarakat pertanian dan kemudian kepada masyarakat industri membawa pula perubahan kehidupan laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat peternakan perempuan telah mulai menjadi makhluk yang ditaklukkan. Ia bergantung kepada laki-laki. Pada masyarakat pertanian, dengan bertambah pentingnya arti pertanian di dalam kehidupan manusia, maka makin tinggilah derajat perempuan dan perempuan itulah yang membuat hukum dan segala aturan kehidupan. Juga dalam urusan agama, perempuan dijadikan pemimpin. Dari gambaran inilah kemudian Soekarno bertanya:

"Manakah kebenaran 'teori' yang mengatakan bahwa sudah kodrat perempuan-perempuan menjadi penunggu rumah tangga dan penunggu periuk saja? " (1963: 56)

Setelah membandingkan masyarakat matriakhat dengan masyarakat patriarkat, Soekarno kemudian memberikan gambaran perempuan dalam masyarakat patriarkat. Ia membedakan antara patriarkat liar dengan patriarkat yang kelewat-batas. Pada kondisi yang pertama, perempuan seringkali digambarkan sebagai makhluk penuh dosa apalagi dengan berkembangnya prostitusi. Pada kondisi yang kedua, laki-laki bersikap merendahkan dan merampas hak-hak perempuan.

Reaksi terhadap masyarakat patriarkat timbul dalam bentuk gerakan. Menurut Soekarno ada tiga tingkatan pergerakan perempuan di dunia barat, yaitu:

- a. Tingkat pertama belum merupakan gerakan. Ia hanya pertemuan antara kawan-kawan. Pertemuan-pertemuan ini menyempurnakan perempuan sebagai isteri dan sebagai ibu.
- b. Tingkat kedua merupakan gerakan kesadaran dalam membantah kelebihan hak laki-laki. Pada umumnya gerakan ini terkenal dengan pergerakan feminisme.
- c. Tingkat ketiga merupakan pergerakan perempuan guna mendatangkan satu dunia baru dimana didalamnya perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat bahagia; dimana ada pertemuan antara pekerjaan masyarakat dan pekerjaan rumah tangga.

Dengan demikian pergerakan perempuan mengalami evolusi. Akhirnya, Soekarno mempertanyakan bagaimana sikap perempuan Indonesia sendiri yang dilakukan langsung olehnya bahwa pergerakan perempuan Indonesia menduduki tingkat kedua pada zaman kolonial Belanda. Lalu bagaimana seharusnya aktivitas perempuan dalam republik yang telah merdeka ini? Jawabannya terletak pada kesadaran perempuan akan dirinya sendiri.

Lebih jauh Soekarno menyampaikan:

“Usaha jang dapat mendatangkan sintese antara pekerdjaan di masjarakat dan tjinta dan keibuan itulah kemenangan! Kemenangan, oleh karena tidak ada satu langkah jang mundur. Tidak mundur di atas lapangan tuntutan kemasyarakatan, tidak mundur di atas lapangan tuntutan alam. Malahan di atas kedua-dua lapangan satu kemadjuan. Di atas lapangan kemasjarakatan satu kemadjuan, oleh karena pekerdjaan di masyarakat mendjadi satu kegembiraan; di atas lapangan tjinta dan keibuan satu kemajuan, oleh karena wanita dapat tjukup waktu untuk mendjalankan tjinta dan keibuan, itu -dandapat mendjalankannya dalam suasana kebahagiaan pula.” (1963: 236)

Sekalipun menekankan peranan perempuan dalam perjuangan menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur, Soekarno menentang adanya gerakan feminisme. Menurutnya gerakan feminisme adalah suatu gerakan perempuan kelas menengah. Perempuan yang benar-benar revolusioner harus menanggalkan feminisme, demikian katanya. Soekarno meyakini, masyarakat ini adalah tetap masyarakat patriarkat, namun yang menurutnya tidak melewati batas. Artinya masyarakat yang sekedar hanya untuk menetapkan hukum turunan dan hukum waris saja, sesuai dengan syarat-syarat perkembangan masyarakat. Pandangan Soekarno ini menyiratkan bahwa sebenarnya kemandirian dan tingkat kesadaran diri pribadi yang relatif tinggi, ada pada setiap perempuan dan laki-laki. Suatu pandangan tentang evolusi masyarakat itu sendiri.

Penelitian tentang Perempuan dan Organisasi Perempuan

Perempuan Penelitian yang saya lakukan pada tahun 1992-1993 dengan judul “Wanita Indonesia: Identitas Sosial, Diri Pribadi dan Pengembangannya dalam Organisasi Wanita” mengulik dengan dalam suatu organisasi perempuan yang berskala nasional yang menunjukkan berbagai gejala yang sel’uPa dengan yang ditengarai oleh Soekarno (Nurrachman, 1993).

Peranan perempuan sebagai ibu ditandai dengan berbagai karakteristik, yaitu: sebagai pendidik anak, generasi muda, umat dan masyarakat; sebagai yang menentukan perempuan kualitas/generasi penerus/bangsa dan yang memajukan pendidikan masyarakat banyak tertera sebagai peran yang diisi oleh perempuan. Dalam hal ini aspek ketubuhan merupakan aspek yang dipandang dan tidak dapat dilepaskan dari perempuan.

Organisasi perempuan sebagai kelompok cenderung dipersepsikan sebagai wadah dan sarana untuk menimba pengetahuan dan pengalaman dalam berbagai bidang. Mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan politik, sekalipun tidak diartikan sebagai politik praktis, serta juga memperluas pergaulan sosial. Organisasi perempuan pun dipandang sebagai wadah dan sarana untuk meningkatkan derajat perempuan, menyalurkan aspirasi dan ide serta memahami kedudukan perempuan dalam keluarga, masyarakat dan negara. Tetapi nilai yang dianut oleh organisasi belum tentu sama dengan nilai yang dianut anggota pimpinannya, karena nilai-nilai organisasi disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial masyarakatnya.

Dalam realisasinya dengan laki-laki, perempuan dipandang mempunyai derajat dan hak yang sama. Perempuan tidak bersikap menyaingi maupun konfrontatif dengan laki-laki. Sekalipun perempuan seyogyanya mendapat perlakuan yang sama serta bekerja sama dengan laki-laki, tetapi masih ada perempuan yang dianggap kodratnya berbeda dengan laki-laki, karenanya hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan akan berbeda pula. Peran perempuan dalam kaitannya dengan suami, masih lebih cenderung dilihat sebagai pendamping dan penunjang profesi serta karier suami. Sebagai isteri ia perlu menghormati dan meminta ijin kepada suami untuk beberapa hal. Perilaku isteri dapat mempengaruhi kondite suami. Sekalipun lebih sedikit, Tetapi ada yang melihat peran perempuan sebagai mitra sejajar suaminya.

Ada hak-hak yang sama dan beda antara suami isteri; isteri dimana perlu membantu dalam menambah nafkah suami ; dimana memungkinkan isteri boleh mengimbangi karier suami dan juga ikut serta dalam menentukan policy keluarga.

Dalam mengorientasikan dirinya terhadap negara, perempuan dilihat sebagai mempunyai peran untuk mengisi kemerdekaan. Perempuan mempunyai potensi dan menganggap dirinya sebagai mitra dan penentu pembangunan dengan dukungan pemerintahan. Untuk ini perempuan menganggap perlu mengingatkan perannya dengan cara meningkatkan kepedulian sosialnya.

Sekalipun dari bagan terlihat bahwa keterkaitan diri pribadi perempuan telah meluas hingga batas negara, bahkan secara vertikal sampai pada keyakinan akan keterkaitannya dengan Rasul dan Tuhan, tetapi bila kata... kata kunci yang menandai keterkaitan tersebut dibaca menurut konteks kalimat jawaban asalnya, maka asumsi yang melandasi studi ini yaitu bahwa identitas sosial perempuan Indonesia sebagai kelompok betumpu pada konsep ibu dapat diterima. Di bawah ini adalah kutipan-kutipan jawaban yang menyatakan hal ini secara eksplisit.

a. Perempuan dan ketubuhannya

“Bahwa perempuan secara hakiki berbeda dengan laki-laki. Khususnya dalam mempergunakan tenaga fisik/otot disesuaikan dalam kodratnya selaku perempuan. Setiap perempuan harus selalu menyadari bahwa dia perempuan yang terlahir secara fisik lemah lembut serta ditakdirkan untuk hamil dan melahirkan, yang tak terjadi pada kaum laki-laki.”

“Perempuan mempunyai fungsi reproduksi yaitu : menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui bayinya.”

b. Perempuan dan Agama / Keyakinannya

“Ciri khas pergerakan perempuan Indonesia masih tetap berlandaskan peraturan agama dan adat, sehingga tampak luwes tetapi kreatif dan maju, meningkatkan derajat dan martabat kaum perempuan menurut kodratnya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.”

c. Perempuan dan Suami

“Pengaruhnya terhadap pengembangan diri adalah membantu tugas karier suami maupun tugas sebagai ibu / isteri, dan dalam mendampingi suami saya juga lebih mantap tanpa harus merasa canggung ketika menghadapi rekan (keluarga) dari suami.”

d. Perempuan dan Anak

*“Menempatkan kembali perempuan ke dalam kedudukannya semula yang mulia
“Surga di bawah telapak kaki ibu”*

“Kejayaan bangsa ditentukan oleh perilaku dan keadaan perempuan sebagai pembentuk karakter dasar pertama dan utama generasi penerus bangsa.”

“Setelah saya mengikuti organisasi ternyata saya menjadi orang baru di dalam memandang suatu persoalan itu dikarenakan wawasan saya lebih luas, banyak ilmu-ilmu non formal yang saya serap yang sangat berguna untuk mendidik anak-anak saya yang sudah mahasiswa hingga saya tidak ketinggalan pada saat berdiskusi tentang pengetahuan umum dengan mereka.”

e. Perempuan dan Kelompok Perempuan

“Organisasi perempuan di Indonesia adalah ormas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia.”

“Pergerakan perempuan Indonesia lebih menonjolkan bagaimana meningkatkan peran kaum perempuan untuk pembangunan baik dalam pemerintahan maupun sosial. Di negara lain lebih ditonjolkan untuk mencari persamaan hak dengan kaum laki-laki.”

f. Perempuan dan Negara

“Pergerakan perempuan Indonesia adalah mitra Pemerintahan/ Negara

Membantu dalam bela Negara dan Pembangunan berdasarkan pada azas Pancasila dan UUD 1945.”

g. Perempuan dan Laki-laki

“Memperjuangkan nasib perempuan yang dibuat sewenang-wenang oleh laki-laki.”

“Perempuan Indonesia ingin mengabdikan sesuatu bersama kaum laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan.”

“Persamaan hak telah diatur dalam undang-undang, begitu dalam sejarah agama Islam. Untuk beribadah, beramal sama hak dan kewajiban antar laki-laki dan perempuan.”

Jelas terlihat bahwa bermacam-macam jawaban yang diberikan masih cenderung berupa pengulangan dari berbagai pernyataan yang sifatnya nomiatif dan berasal dari kelompok laki-laki sebagai penentu kebijakan sosial.

Kelompok perempuan ini banyak memberikan respon dengan segala variasi jawabannya mengenai kaitan perempuan dengan sesama kelompok perempuan. Dalam hal ini perlu dipikirkan hanya sampai sejauh inilah kelompok responden demikian menekankan female bonding sehingga dapat menimbulkan kesan segregasi dengan kelompok laki-laki? Dari apa saja yang dapat dikatakan tentang perempuan dan organisasi perempuan, maka aspek nilai mendapat sorotan yang paling banyak. Apa yang dinyatakan sebagai nilai dapat dilihat dari jawaban-jawaban di bawah ini:

“Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut tuntutan Islam.”

“Membimbing kaum perempuan ke arah kesadaran beragama dan bemrgam'sasi.”

Dari bagaimana pandangan tentang perempuan dan organisasi perempuan dinyatakan, maka pandangan atas dasar opini atau pendapat umumlah yang paling menonjol dipakai. Terlihat bahwa perempuan responden lebih cenderung mengungkapkan diri berupa penilaian tentang perempuan.

Seperti telah dinyatakan dalam bab awal maka diri pribadi dapat didefinisikan sebagai objek atau proses. Sebagai objek, maka dari pribadi tergambar melalui berbagai sikap, perasaan, persepsi dan evaluasi tentang dirinya sendiri. Sedangkan sebagai proses, maka diri pribadi adalah yang melakukan (the doer) yang mencakup proses-proses berpikir, mengingat dan kecenderungan untuk bertindak.

Mengacu pada jawaban-jawaban yang diberikan para subjek, 'campaknya para subjek sebagai perempuan masih mendefinisikan diri pribadinya Sebagai objek dan masih kurang melihat diri sebagai pelaku. Dari kompilasi jawaban yang diberikan terlihat bahwa penggolongan responden atas dasar kelompok usia. latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi tidak membedakan kecenderungan Jawaban yang diberikan.

Ahirnya pengertian responden penelitian tentang konsep-konsep yang terkait pada perilaku perempuan yang disajikan di bawah ini.

a. Emansipasi Perempuan Indonesia

Cenderung diartikan sebagai persamaan peran dalam mengisi pembangunan; pembebasan dari kebiasaan tradisional dan keterbelakangan untuk diakui sebagai mitra sejajar laki-laki.

b. Feminisme

Lebih cenderung diartikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keperempuanan seperti cara berpakaian dan penampilan diri sebagai perempuan; sifat-sifat perempuan seperti anggun dan lemah lembut serta kodratnya sebagai ibu dari anak-anaknya. Padahal yang dimaksudkan adalah feminisme sebagai suatu gerakan.

c. Kodrat Perempuan

Fungsi reproduksi perempuan dalam hal mengandung, melahirkan serta menyusui serta mendidik anak perempuan kecenderungan arti konsep ini. Selain itu hal ini dianggap sebagai keterbatasan dan hambatan alamiah sekalipun ada unsur kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Pandangan tentang pengertian kodrat-pun diberikan secara berbeda oleh tiga responden lainnya. Satu pandangan menyatakan bahwa perempuan sebenarnya tidak perlu diingatkan kepada kodratnya, karena itu sudah menjadi bagian yang sudah ada (inherent) dalam diri itu sendiri.

Pandangan lain menyatakan bahwa kalau kodrat perempuan dikaitkan kepada fungsi reproduksinya, dimana tujuannya adalah untuk melangsungkan keturunan, maka laki-laki pun juga mempunyai kodrat yang demikian. Karena tanpa adanya laki-laki, bagaimana perempuan itu bisa mengandung? Dan kalau perempuan dan laki-laki diperlukan guna kelangsungan hidup manusia, mengapa hanya perempuan saja yang selalu diingatkan akan kodratnya?

Pandangan yang terakhir mengemukakan suatu pemikiran yang lebih jauh bila kita bandingkan dengan pendapat para subjek penelitian lainnya. Subjek terakhir ini berbicara tentang kodrat manusia sebagai sesuatu yang mencakup perempuan dan laki-laki dan yang membedakan manusia dari hewan. Menurutnya, akal adalah sesuatu yang kodratnya ada pada manusia.

a. Subjek dan Objek Pembangunan

Perempuan sebagai objek pembangunan cenderung diartikan sebagai peran sertanya dalam pembangunan dalam kedudukannya sebagai pelaksana, diartikan pula sebagai pangkal tolak eksistensi suatu bangsa dan dalam peranannya sebagai ibu.

Sebagai objek pembangunan, terdapat dua sisi pengertian. Pengertian yang positif melihat bahwa sebagai objek, perempuan lebih ditingkatkan, kemampuan dan pengetahuannya. Pengertian yang negatif cenderung melihat objek pembangunan sebagai bentuk eksploitasi.

b. Peran Ganda

Secara umum diartikan sebagai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Tetapi ada pula yang mengartikan sebagai gejala peran suatu organisasi isteri instansi pemerintah/ABRI dalam menunjang tugas suami. Ada pula yang menyatakan bahwa peran ganda tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi berlaku juga bagi laki-laki.

c. Mitra Seajar

Kecenderungan kuat menunjukkan pada arti sebagai kawan yang dapat diajak kerjasama dan saling menunjang, dapat mendampingi sebagai teman dan sahabat yang dapat memberi dorongan kepada suami serta melihat laki-laki sebagai teman sepejuangan dalam hidup. Namun ada pula yang mengartikan adanya hak dan kewajiban yang sama antar laki-laki dan perempuan terhadap keluarga dan lapangan kerja, derajat dan kemampuan yang sama, sebagai teman hidup dan sekerja serta berpartisipasi sama-sama dalam pembangunan.

d. Ibu Negara

Diartikan sebagai pendidik bangsa; tiang negara; panutan yang dapat meningkatkan identitas dan citra perempuan serta bangsa. Namun ada yang menganggapnya sebagai mitos untuk menyenangkan perempuan.

Sebutan ibu bangsa dan Hari Ibu adalah sebutan-sebutan yang sering disitir karena nilai dan latar belakang sejarah, tanpa elaborasi yang lebih dalam. Hanya ada tiga responden -ketiga-tiganya menikah, dua diantaranya mempunyai anak dan satu dapat digolongkan ke dalam golongan usia dewasa mudayang secara eksplisit menyatakan bahwa:

Pertama, perempuan tidak identik dengan ibu. Perempuan adalah pribadi yang memiliki jenis kelamin yang berbeda darilaki-laki sedangkan ibu adalah status dan

peran karena telah melahirkan anak. Meski semua perempuan berpotensi untuk melahirkan dan menjadi ibu, kenyataannya tidak semua perempuan demikian.

Kedua, terdapat pengertian bahwa mother is more a symbolic attribution yang di Indonesia masih sangat kuat. Berbagai atribusi simbolik telah dikenakan atau dikaitkan dengan ibu. Misalnya, "Ibu Kota", "Ibu" " Negara", "Ibu sebagai pembina generasi muda , Surga di bawah telapak kaki ibu". Semua atribusi ini sifatnya simbolik dan tidak ada kaitannya secara langsung dengan peran perempuan sebagai ibu dari anak-anaknya. Sebagai atribusi simbolik ibu dikenakan berbagai makna yang lebih besar dari gambaran manusiawi perempuan itu sendiri.

Ketiga, ada pula yang beranggapan motherhood is not the end of womanhood. Menjadi ibu bukanlah akhir bagi perempuan untuk mengembangkan diri dengan identitas diri sebagai pribadi. Menjadi ibu tidak perlu menghentikan berbagai aktifitas yang dilakukan atas dasar kapasitas, kesenangan dan tujuan bagi diri sendiri.

Namun ketika diminta lebih lanjut memberi pandangan tentang apa atau siapa itu perempuan yang berbeda dengan ibu, sukar sekali bagi mereka untuk menjawabnya. Temuan penelitian ini menyadarkan kita bahwa perempuan dibalut dengan berbagai hal yang dapat mengakibatkan kaburnya diri perempuan itu sendiri sebagai pribadi. Kenyataan menunjukkan bahwa perempuan perlu mengartikulasikan suaranya melalui solidaritas antar sesama dalam bentuk organisasi jika ingin didengar oleh masyarakat yang didominasi pandangan laki-laki

Namun interaksi antar sesama perempuan memiliki sisi kekuatan dan kelemahannya. Ia dapat menjadi kekuatan yang besar bila digalang melalui bentuk-bentuk kerja dan aktifitas yang terencana, terukur dan terjadwal sebagaimana biasanya lebih cenderung dilakukan laki-laki. Ia perlu mengurangi kelemahan dalam menjadikan organisasi sebagai ajang pertemuan sosial belaka.

Daftar Acuan:

Abrams, Dominic. "Differential Association: Social Development in Gender Identity and Intergroup Relations during Adolescence" in Skevington, S.

; Baker , D. eds. The Social Identity of Women. London: Sage Publications, 1989.

Allport, Gordon W. Patterns and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart Winston, 1961.

As, B. "Female Culture". In *Developmental Journal of the Society for International Development*. 1984: 4, 34-36. Rome. 1984.

Baker, D.: "Social Identity in the Transition to Motherhood" in Skevington, S. Baker, D. eds. *The Social Identity of Women*. London: Sage Publications, 1989.

Bernard, Jesse. *The Female World*. London: The Free Press: 1981.

Brewer, Marilyn B. "The Social Self: On being the Same and Different at the Same Time". In *Society for Personality and Social Psychology*, Vol 17 No. 5: pp 475-482.

Personality and Social Psychology Bulletin. psp.sagepub.com. 1991.

Caplan, Paula J. *Between Women, Lowering the Barriers*. Toronto: Personal Library, 1981.

Djohan, Bahder. *Ditangan Wanita*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.

Enders-Dragaesser, Uta: *Women's Identity and Development within a Paradoxical Reality*. In *Women's Studies International Forum*, Vol. 11 no. 6, pp. 583-590. 1988.

Friday, Nancy. *My Mother My Self: The Daughter's Search for Identity*. New York: Dell Publishing, Co., 1977.

Gurin, P., Markus, H. "Cognitive Consequences of Gender Identity". In Skevington, S., Baker, D. eds. *The Social Identity of Women*. London: Sage Publications, 1989.

James, William. *Psychology: Briefer Course*. New York: Collier Books, 1962.

McBride, A. 8. *The Growth and Development of Mothers*. New York, Barnes & Noble Book: 1973.

Mead, George Herbert. *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.

Raymond, Janice, G. *A Passion for Friends. Toward a Philosophy of Female Affection* Boston: Beacon Press, 1986.

Rubin, Lilian B. *Women of a certain Age. The Midlife Search for Self*. New York: Harper Colophon Books, 1979.

Sherif, Muzafer & Sherif, Carolyn W. *Social Psychology*. New York: Harper & Row Publisher. 1951.

Skevington, S., Baker, D. eds. *The Social Identity of Women*. London: Sage Publication, 1989.

Soekarno. Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjoengan Repoeblik Indonesia. Jakarta: Panitia Penerbit Buku-buku karangan Presiden Soekarno, 1963.

Tajfel, Henry ed. Social Identity and Intergroup Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Turner, John C. "Towards 3 Cognitive Redefinition of the Social Group". In Tajfel, H. ed. social Ident1'ty and Intergroup Realtions. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

Washburn, Penelope. Becoming Woman. The Quest for Wholeness in Female Experience. New York: Harper & Row Publisher, 1977.

C. Latihan

1. Bagaimana permasalahan gender yang ada di Indonesia?
2. Strategi apa saja yang dianjurkan dan perlu diabil menurut Williams dan Giles oleh perempuan agar memperoleh arti positif sebagai kelompok perempuan?
3. Bagaimana tingkatan pergerakan perempuan didunia Barat menurut Soekarno?

D. Kunci Jawaban

1. Permasalahan kesetaraan gender di Indonesia pada umumnya tidak lagi berhubungan dengan kesempatan mendapat pendidikan dasar dan lanjutan, namun lebih berhubungan dengan pemilihan pendidikan tinggi dan bidang studi. Dalam hal ini, perempuan cenderung memilih bidang-bidang yang sesuai dengan konstruksi sosialnya yang menuntut sikap merawat atau mengasuh (nurturance), misalnya keperawatan, kedokteran gigi, psikologi, dan desain interior. Masih sedikit perempuan yang masuk di bidang-bidang yang umumnya dikuasai laki-laki karena lebih bersifat maskulin, misalnya otomotif dan penerbangan. Bidangbidang lain cenderung mengalami pergeseran. Bidang kedokteran misalnya, pada waktu lampau dikuasai laki-laki, sekarang telah ditekuni perempuan dengan proporsi yang setara. Pada keluarga ekonomi menengah ke bawah, ada kecenderungan anak

perempuan diarahkan untuk mengambil pendidikan akademi yang membutuhkan waktu lebih pendek dibanding pendidikan di universitas.

2. Ada dua strategi yang dianjurkan oleh Williams dan Giles, untuk mengambil tindakan tersebut. Pertama, bila perempuan berada dalam posisi dimana kebutuhannya dapat dipenuhi, maka kemungkinan besar ia memilih untuk meningkatkan status pribadinya secara individual. Misalnya dengan mendefinisikan dirinya secara fungsional dengan jabatan atau posisi suaminya. Dengan mengarahkan usahanya untuk memperbaiki status sosial suami, perempuan mungkin saja mengalami peningkatan gambaran dirinya. Sebaliknya, kedua, bila perempuan secara kolektif tidak dapat menerima status mereka sebagai kelompok perempuan, mereka mungkin akan mengambil tindakan untuk memantapkan suatu identitas sosial yang positif bagi kelompoknya tersebut.
3. Menurut Soekarno ada tiga tingkatan pergerakan perempuan di dunia barat, yaitu:
 - a. Tingkat pertama belum merupakan gerakan. Ia hanya pertemuan antara kawan-kawan. Pertemuan-pertemuan ini menyempurnakan perempuan sebagai isteri dan sebagai ibu.
 - b. Tingkat kedua merupakan gerakan kesadaran dalam membantah kelebihan hak laki-laki. Pada umumnya gerakan ini terkenal dengan pergerakan feminisme.
 - c. Tingkat ketiga merupakan pergerakan perempuan guna mendatangkan satu dunia baru dimana didalamnya perempuan dan laki-laki sama-sama mendapat bahagia; dimana ada pertemuan antara pekerjaan masyarakat dan pekerjaan rumah tangga.

E. Daftar Pustaka

Nurrachman, N. & Bachtiar, I. (2011), Psikologi Perempuan: Pendekatan Kontekstual Indonesia. Universitas Atma Jaya: Jakarta.